


MEMBANGUN SEMANGAT OTONOMI DI DESA MELALUI PERAN LURAH

Oleh

Christriyati Ariani¹

 *In line with power exchange in central level, followed by the change of paradigm about rural development that is highly emphasizing bottom-up concept, the political conditions of rural area were also changed. Since the regional autonomy had been implemented, village is becoming very important area. Participation of rural people in rural development is obtaining "honors" place and position in set up every village policy. Rural people are becoming important element in establishing village policies, with their position is equal to those of village administration officers, as well as those of village legislative council (BPD). Rural people are not anymore becoming "objects" of every policy prevailed in rural area. Instead, rural people are becoming a party participating in determining their village policies. This alteration process is continuously occurred until now in rural level. This research is particularly describing the village chief roles of Girirejo, in Imogiri district, in developing spirit of autonomy (self-help) in rural area.*

A. Pengantar

Otonomi daerah menjadi topik yang menarik perhatian, karena begitu besar perubahan yang ditimbulkannya, terutama bagi kehidupan warga desa, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Sejalan dengan pergantian kekuasaan di tingkat pusat, yang kemudian diikuti dengan adanya perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang lebih menekankan kepada konsep *bottom up*, ternyata telah mengubah kondisi politik yang terjadi di desa. Sejak bergulirnya otonomi daerah, desa menjadi wilayah yang sangat penting. Peran serta warga desa dalam kancah pembangunan desa mendapat tempat dan posisi "terhormat" dalam menentukan segala kebijakan desa. Warga desa menjadi elemen penting dalam menentukan kebijakan

desa, yang sejajar dengan pemerintah desa, maupun badan legislatif desa BPD. Warga desa bukan lagi menjadi "obyek" yang selalu menjadi sasaran dalam setiap kebijakan yang berlaku di desa. Akan tetapi warga desa menjadi sosok yang ikut serta dalam menentukan kebijakan desanya. Proses perubahan itu hingga saat ini terus berlangsung di pedesaan. Proses perubahan tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita tanpa didukung oleh peran serta lurah desa sebagai motivator pembangunan. Oleh karena itu, artikel ini ingin memaparkan bagaimana peran serta lurah desa dalam menumbuhkan semangat otonomi (kemandirian) di desa.

Penelitian dilakukan di Desa Girirejo, Imogiri, Bantul pada bulan Maret-Agustus 2004, sehingga alam demokrasi yang tumbuh di desa masih

1. Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

berpijak berdasar UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan belum berpijak kepada UU 32/2004 tentang Revisi atau Penyempurnaan terhadap UU 22/1999. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian inipun masih mengacu kepada bentuk pemerintahan desa yang termaktup dalam UU 22/1999, yang menurut saya lebih bisa menumbuhkan semangat berdemokrasi di desa.

Berlakunya otonomi daerah yang seringkali disebut dengan era "keterbukaan" ternyata bisa "menggugah" dan mengubah kondisi warga desa yang selama ini selalu dikonotasikan sebagai "obyek" pembangunan, selalu *nrimo* berbagai program pembangunan yang telah "dikemas" oleh pemerintah (pusat maupun daerah), tanpa diberi kebebasan untuk menentukan jenis pembangunan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi desanya. Alam demokrasi seakan-akan masih jauh dari jangkauan warga desa. Kebebasan dalam menentukan berbagai kebijakan desa terasa masih jauh dari angan-angannya. Akan tetapi semenjak bergulirnya otonomi daerah hingga ke tingkat desa, warga desa beserta seluruh aparat pemerintahannya bersatu padu, menyatukan tekad dan semangat untuk mewujudkan tercapainya desa yang maju dan mandiri di masa yang akan datang. Cita-cita mulia itu tentu saja tidak akan dapat terwujud apabila tanpa didukung oleh seluruh warga desa beserta aparat pemerintahan desa, terutama peran lurah. Oleh karenanya tidak mustahil apabila peran lurah dalam menumbuhkan semangat "berdemokrasi" di era otonomi daerah saat ini menjadi penting. Untuk itu, artikel ini memaparkan bagaimana semangat otonomi tumbuh di desa, melalui peran lurah.

B. Lurah Desa: Motivator Pelaksanaan Otonomi Di Desa

Otonomi Daerah atau sering disingkat dengan *otda*, menjadi isu yang paling menarik dibicarakan, dibahas maupun diperbincangkan semenjak kepemimpinan Presiden Suharto berakhir, pada tahun 1998. Oleh karenanya ketika Presiden Habibie menerapkan kebijakan *otda* melalui UU No. 22/1999, disambut dengan antusias yang tinggi oleh daerah-daerah, terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Secara politis, dengan berlakunya UU 22/1999 sebagai antisipasi karena begitu kuatnya keinginan daerah untuk melepaskan diri dari koridor NKRI. Semangat nasionalisme menjadi melemah seiring dengan lunturnya prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan masyarakat karena semakin terpuruknya kondisi perekonomian negara akibat kasus-kasus KKN yang kian merebak. Warga masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin yang menjadi *panutan*.

Bagi Pemerintah Daerah Bantul, dengan bergulirnya era otonomi daerah ternyata disambut positif. Hal itu ditindaklanjuti dengan keluarnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengkomodasi kepentingan desa sejalan dengan kondisi yang berkembang saat itu. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Bantul mengeluarkan Perda Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17 Tahun 2000 yang kesemuanya mengatur seluk beluk tentang pemerintahan desa beserta aparat pemerintah yang menjalankannya. Hal yang sangat menarik dicermati antara lain keluarnya Perda No. 13/2000 tentang Susunan Pemerintahan Desa. Di dalam Perda tersebut, Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul mengembalikan istilah penyebutan kepala desa menjadi lurah, perangkat desa menjadi pamong desa, sekretaris desa menjadi carik, serta kepala dusun menjadi kepala dukuh. Tujuan utama dengan keluarnya Perda No.13/2000 boleh dikatakan bahwa Pemerintah Bantul berusaha untuk mendekatkan peran kepala desa kepada warga desa yang dipimpinnya. Hal itu tentu saja akan mengakibatkan perubahan peran kepala desa menjadi sosok lurah yang diharapkan dapat mengerti dan memahami kesulitan dan kebutuhan warga desa yang dipimpinnya.

Bagi masyarakat Jawa, istilah lurah diartikan sebagai *pengarep*, pemuka atau seorang pemimpin yang selalu berada di depan. Seorang lurah diharapkan bisa memimpin warganya, bisa menunjukkan keteladanan, termasuk bisa mendorong dan memotivasi bagi kemajuan desa beserta warga yang di pimpinnya. Kajian yang dilakukan Suhartono (1990) menunjukkan sejarah peran dan fungsi lurah yang bermula dari kedudukannya sebagai *bekel*. Pada masa penjajahan, peran lurah menjadi alat penguasa saat itu untuk menjalankan kepentingannya. Peran lurah terbelenggu antara kepentingan penguasa dan pengabdian yang harus dijalankannya. Kondisi itu berlangsung hingga masa Orde Lama serta Orde Baru.

Saat ini, sejalan dengan era "keterbukaan" dalam kerangka otonomi daerah peran lurah sebagai seorang *pengarep* di desa menjadi berubah. Lurah bukan lagi sebagai sosok yang selalu harus dihormati, disegani, ditakuti dan harus "diberi jarak". Namun, seorang lurah harus pandai mengikuti alur kebutuhan dan kepentingan warga desa sesuai dengan kondisi desa yang sedang berubah saat

ini. Lurah harus pandai menempatkan diri sebagai pemimpin sekaligus sebagai *pengayom* bagi warga desa. Lalu bagaimana peran yang ditampilkan oleh sosok lurah dalam membangun semangat otonomi di desa saat ini? Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Girirejo, Imogiri, Bantul mungkin merupakan salah satu dari sejumlah desa yang terdapat di Kabupaten Bantul yang bisa dijadikan contoh.

C. Sekilas Desa Girirejo dan Potret Keberhasilannya

Desa Girirejo, Imogiri, Bantul merupakan desa yang terletak di sisi bagian timur dari Kabupaten Bantul. Desa ini terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Kabupaten Bantul yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Desa Girirejo merupakan Desa Tertinggal semenjak tahun 1996, namun demikian Desa Girirejo tidak mau ketinggalan dengan kondisi desa-desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul dalam "menyongsong" era otonomi.

Desa Girirejo, merupakan desa terbuka dalam arti bahwa desa ini sangat mudah dijangkau, baik oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jalan-jalan desa yang ada dalam kondisi sangat baik, halus serta lancar. Selain berpredikat sebagai Desa IDT (Inpres Desa Tertinggal), Girirejo juga dikenal sebagai desa perajin (keris, batik, kulit) yang diupayakan oleh penduduk setempat sejak bertahun-tahun. Bahkan jangan heran apabila Desa Girirejo memiliki perajin keris handal, yang dikenal hingga ke mancanegara. Ketekunannya yang dilakukan oleh salah seorang perajin keris, membuat Desa Girirejo menjadi desa sentra kerajinan keris yang bisa

memberikan lapangan pekerjaan bagi para pemuda desa. Kerajinan keris Girirejo yang tersentra di Dusun Banyusumurup paling tidak telah memberikan lapangan pekerjaan bagi 10% dari total jumlah penduduknya. Akan tetapi sangat disayangkan karena usaha kerajinan ini belum bisa mengangkat tingkat pendidikan penduduk setempat yang relatif masih rendah (60% tamat SD). Penduduk Desa Girirejo yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani serta buruh tani, ternyata memiliki jumlah yang cukup besar, 80%. Mereka sebagian besar hanya memiliki lahan pertanian yang relatif kecil, di daerah bukit (berupa tegalan, ladang), dan hanya sebagian kecil saja (20%) yang mengupayakan lahan persawahan.

Tingginya penduduk miskin di Desa Girirejo mengakibatkan tumbuhnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Namun demikian, berkat usaha yang telah dilakukan oleh lurah desa beserta pamong desa lainnya, ternyata jumlah penduduk miskin yang terdapat di Desa Girirejo berangsur-angsur menjadi berkurang. Keberhasilan Desa Girirejo dalam mengentaskan kemiskinan ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah keluarga miskin yang semula ada 383 KK pada tahun 2003 menjadi 297 KK pada tahun 2004. Jumlah tersebut diupayakan terus berkurang dengan berbagai program pembangunan desa yang selama ini telah dilaksanakan.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah memberikan ketrampilan dan pelatihan yang kepada warga Desa Girirejo yang memerlukan dan memang perlu dibantu. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari berbagai usaha dan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah kabupaten Bantul, disamping beberapa usaha swadaya

warga setempat. Semenjak bergulirnya era otonomi daerah warga Desa Girirejo menjadi tergugah untuk menata diri dan membangun desanya untuk terus maju mengejar "ketertinggalan"-nya.

Potensi dan kemampuan desa terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan desa baik di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Di sektor ekonomi misalnya saat ini Desa Girirejo giat mengembangkan industri kerajinan (keris, batik, kulit) baik dalam skala besar maupun kecil, melalui sistem magang bagi pemuda yang dikoordinir oleh pengusaha besar, walaupun sebagian besar warga desa masih mengusahakan matapencahariann di sektor pertanian. Peluang tumbuhnya sektor kerajinan (terutama batik) semakin besar setelah berdirinya Musium Batik Imogiri dan telah diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, selaku Gubernur DIY, Maret 2004.

Di bidang sosial, era keterbukaan membuat warga Desa Girirejo menjadi tanggap terhadap permasalahan desa. Era otonomi daerah, menumbuhkan semangat egaliter di antara sesama warga desa, karena mereka merasa mempunyai kepedulian dan kepentingan bersama. Hal itu tercermin dalam berbagai kegiatan desa yang selalu dipenuhi oleh warga desa, baik kegiatan yang berhubungan dengan program desa maupun kunjungan para pejabat daerah. Semangat kebersamaan juga ditunjukkan dengan semakin akrabnya warga desa dalam mensikapi semua kepentingan desa termasuk dalam pencarian dana bantuan melalui beberapa proposal bantuan yang ditujukan kepada para penyandang dana. Hampir di setiap dusun (5 dusun) yang terdapat di Desa Girirejo telah melaksanakan hal itu.

Di bidang budaya, Desa Girirejo

telah berperan aktif dalam berbagai lomba budaya sehubungan dengan adanya Pekan Budaya Imogiri yang telah berlangsung bulan Maret 2005 yang lalu. Walaupun kegiatan ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata semangat untuk terus mengembangkan diri bagi warga Girirejo tidak luntur. Mereka tetap berpartisipasi dalam kegiatan budaya melalui Lomba Makanan Tradisional. Kegiatan itu dikoordinir melalui PKK desa dan digalakkan oleh ibu lurah desa. Walaupun saat itu (2004) PKK Desa Girirejo hanya belum memperoleh kejuaraan pertama, namun jerih payah dan rasa kebersamaan di antara mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut patut dihargai.

Di bidang pemerintahan desa yang terjadi di Desa Girirejo patut diberi penghargaan. Betapa tidak, mungkin Desa Girirejo merupakan salah satu desa yang telah menerapkan semangat demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah maupun pamong desa lainnya yang berlangsung pada tahun 1999. Di dalam proses pemilihan lurah maupun pamong desa, warga desa Girirejo tidak mengenal adanya praktik politik uang (*money politics*) yang selama ini cukup semarak seperti yang terjadi di beberapa desa Jawa. Selain itu, lembaran sejarah politik yang tidak pernah dilupakan oleh warga Desa Girirejo adalah keberhasilannya dalam *melengserkan* seorang sekretaris desa, yang saat itu dikenal melakukan KKN. Mereka berhasil melakukan "pengadilan rakyat", sehingga sosok sekdes bukan lagi menduduki jabatan yang kebal terhadap hukum. Walaupun dikenal sebagai desa tertinggal, namun warga Desa Girirejo justru tidak pernah tertinggal dalam menerapkan transparansi yang ingin diwujudkan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, bagi warga desa Girirejo bersih dari

KKN merupakan prasyarat penting dan utama dalam memilih pemimpin desa.

D. Peran Lurah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa

Saat ini, roda pemerintahan Desa Girirejo dipimpin oleh seorang lurah yang relatif masih muda hasil pilihan langsung warga desa pada tahun 1999. Semangat muda yang masih menggelora di antara para pamong desa Girirejo juga memberikan warna tersendiri dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri di masa depan. Mereka sebagian besar masih mempunyai dedikasi dan idealisme yang masih tinggi. Salah satu upaya yang dilakukannya antara lain berusaha selalu dekat dengan warganya tanpa membedakan batas-batas sosial, ekonomi, politik warga. Lurah selalu mengetahui, mengerti serta memahami permasalahan warga dan berusaha untuk selalu memecahkan masalah yang dihadapi warganya. Di dalam sistem pemerintahan desa, Lurah Desa Girirejo berusaha untuk selalu menciptakan keterbukaan, efisiensi, tanggungjawab, maupun bentuk pembangunan desa yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di desa. Di dalam sistem pemerintahan desa misalnya, mereka tidak membedakan antara "bawahan" dengan "atasan" di antara sesama pamong desa, sehingga mereka tidak mengenal adanya konsep lurah desa selaku pejabat "atasan" maupun pamong desa selaku "pembantu" lurah. Dalam menjalankan tugasnya, lurah Desa Girirejo senantiasa selalu mengedepankan diskusi untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul. Mereka merasa bertanggungjawab secara bersama tanpa mengecilkkan masalah yang

dihadapi. Selain itu, selalu mohon pertimbangan kepada sesama pamong desa merupakan jalan keluar terbaik yang seringkali dilakukan oleh lurah. Dengan demikian setiap pamong desa mengetahui benar permasalahan yang sedang dihadapi desanya. Kecuali itu, kepada sesama pamong desa lurah Desa Girirejo juga tidak membangun "jarak" sehingga warga desa merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. Bahkan di saat kapanpun ia selalu berkenan untuk dimintai bantuan maupun dorongannya dalam segala bentuk permasalahan desa yang sedang dihadapi.

Di dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan desa dan dipimpin lurah, selalu mengikutsertakan warga miskin, yang kadangkala mereka tidak tersentuh. Kebiasaan warga desa untuk mengeluarkan pendapat di dalam forum maupun pertemuan selalu dikembangkan dengan jalan memberi kesempatan kepada warga untuk mengkritisi jalannya kepemimpinan desa yang berlangsung saat ini. Desa Girirejo dalam menyongsong era keterbukaan antara lain juga dengan menerapkan keikutsertaan warga desa dalam menentukan pembangunan desa berdasarkan skala prioritas. Pembangunan desa difokuskan dalam setiap pedukuhan, sehingga setiap warga dusun diharapkan dapat memberikan pilihan pembangunan yang dibutuhkan. Setiap dukuh terdiri dari Pokja (kelompok kerja) yang selanjutnya usulan-usulan yang diajukan ditampung melalui Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa). Semangat untuk mewujudkan otonomi desa ternyata tidak bisa berjalan bila tidak dimulai dari para pemimpin desa. Menumbuhkan rasa kepedulian warga terhadap desa merupakan komitmen penting yang diciptakan lurah untuk mengantisipasi timbulnya gejolak yang akhir-akhir ini menjadi *trend* di era keterbukaan kali ini.

E. Penutup

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Girirejo sejalan dengan era otonomi daerah kali ini, ternyata telah mengubah pola pemikiran warga desa maupun para pamong desa terhadap kemajuan desanya. Dengan bergulirnya otonomi daerah dimana desa diberi kewenangan dalam mengurus, mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan UU 22/1999, maka telah terjadi perubahan dalam diri warga desa maupun para pemimpinnya. Di satu sisi warga desa mendapatkan "tempat" terhormat, karena jabatan lurah desa harus dipertanggungjawabkan kepada warga desa melalui BPD. Suara "rakyat" sebagai penentu langgeng tidaknya posisi lurah dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu tanpa di dukung dengan gaya kepemimpinan lurah yang selalu berpihak kepada warga desa, niscaya jabatan lurah selalu diwarnai oleh berbagai gejolak. Saat ini peran serta lurah dalam mewujudkan desa yang mandiri sesuai amanat dalam UU 22/1999 semakin dibutuhkan. Lurah desa harus pandai memotivasi warga desa dengan jalan menciptakan suasana hubungan kerja tanpa dibatasi "jarak", sehingga warga desa merasa nyaman terhadap pola kepemimpinan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap lurah.

Disamping itu, peran serta lurah dalam mewujudkan kondisi pemerintahan desa berdasarkan kepada prinsip *good governance* menjadi prasyarat penting yang tidak boleh dikesampingkan. Prinsip pemerintahan desa yang berpijak kepada rasa tanggung jawab, efisien, transparan, partisipatif serta tanggap (responsif) terhadap persoalan desa beserta warganya, menjadi prioritas utama.

Beberapa ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan cara seringkali mengadakan dialog kepada warga desa, serta mereka diberi kesempatan untuk "mengkritisi" dan mencermati jalannya pemerintahan yang berlangsung. Warga desa diberi kesempatan untuk "menyuarakan" aspirasinya tanpa harus dibebani oleh ancaman apapun, bila aspirasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, baik secara sosial maupun politis, karena tujuan utama dalam menciptakan otonomi desa adalah penguatan warga desa kearah kemandirian desa (Tim IRE, 2003; Yuliantara, 2002, Eko dan Dwipayana, 2004).

Terbangunnya hubungan antara lurah desa (pemimpin) serta warga desa (yang dipimpin) harus tercipta hubungan yang bersifat "bapak-anak"

sehingga diharapkan akan terus terjalin secara harmonis. Namun demikian sejalan dengan era otonomi daerah yang ditandai dengan alam keterbukaan, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya resistensi (penolakan) terhadap sistem yang berlaku. Secara budaya, penolakan terjadi manakala tatakrama mulai ditinggalkan oleh warga desa karena batas antara seorang pemimpin dengan warga yang dipimpin menjadi sangat kabur. Warga desa seringkali hanya mengedepankan rasa emosionalitas belaka tanpa didasari oleh logika dan akal sehat dalam menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu peran serta lurah dalam mewujudkan desa yang mandiri, terbuka, partisipatif, transparan sesuai dengan "roh" otonomi daerah sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Eko, Sutoro dan Dwipayana, Ari

2004 *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Suhartono

1990 "*Lungguh dan Lurah, Perspektif Sejarah*", makalah Seminar Lembaga Javanologi, Yogyakarta

Tim IRE

2003 "*Pembaharuan Desa*" dalam *Abstraksi Final Report Program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: IRE Press

Yuliantara, Dadang

2002 *Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: Lapera